

ABSTRAK

Analisis penerimaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM) khususnya di Fungsi Pengawasan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Pematang Siantar dari tahun 2017-2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian CRM dalam pengoptimalan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan mengetahui penerapan pengawasan pajak dengan metode CRM dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pematang Siantar. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pengawasan pajak. Data yang diolah dari KPP Pratama Pematang Siantar menunjukkan tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahunan 2020-2022 masing-masing sebesar 63,87%; 70,12%; dan 46,99%. Permasalahan yang dapat menghambat kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak, kurangnya pemahaman Wajib Pajak, dan kurang berkualitasnya pelayanan pajak. Solusi dalam mengatasi permasalahan khususnya di ruang lingkup DJP adalah mengefektifkan dan mengefisienkan penerapan CRM. Hal ini terbukti dari peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pematang Siantar yang relatif meningkat di tiap tahunnya sejak penerapan CRM.

Kata Kunci: *Compliance Risk Management*, Penerimaan Pajak, *Behavioral Benchmark Model*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Analysis of tax revenue with the Compliance Risk Management (CRM) model, especially in the Supervision Function, is used to determine how much the level of tax revenue at the KPP Pratama Pematang Siantar from 2017-2020. This study also aims to determine the implementation of CRM in optimizing the level of taxpayer compliance and to determine the application of tax supervision with the CRM method in increasing tax revenue at the KPP Pratama Pematang Siantar. The method used is qualitative to describe and summarize various conditions, situations, or various phenomena of social reality that occur in society, especially in the implementation of tax supervision. The data processed from the KPP Pratama Pematang Siantar shows that the compliance ratio for submitting the 2020-2022 Annual Income Tax Return is 63.87%; 70.12%; and 46.99%, respectively. Problems that can hinder taxpayer compliance which will have an impact on tax revenue are lack of taxpayer awareness, lack of taxpayer understanding, and poor quality of tax services. The solution in overcoming problems, especially in the scope of DGT, is to streamline and streamline the application of CRM. This is evident from the increase in tax revenue at KPP Pratama Pematang Siantar which has relatively increased every year since the implementation of CRM.

Keywords: Compliance Risk Management, Tax Revenue, Behavioral Benchmark Model, Taxpayer Compliance